



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
(PENGAWASAN TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA TIK)
KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 16 S.D. 18 NOVEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan
2. UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang No.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
9. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
10. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 31 Oktober 2023.

B. Tujuan

Mengacu pada persoalan di atas, maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan terkait bantuan perangkat TIK ke Kabupaten Brebes Jawa Tengah untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan bantuan perangkat TIK ke satuan pendidikan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kunjungan Kerja

Metode yang digunakan dalam melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan Komisi X DPR RI adalah pertemuan dengan:

1. Bupati Brebes

2. Ketua DPRD Kabupaten Brebes
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes
6. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)
7. Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Brebes
8. Satuan Pendidikan (Sekolah) Penerima Bantuan Perangkat TIK (5-10 sekolah)
9. Tokoh Pendidikan Kabupaten Brebes
10. Akademisi (FKIP Universitas Muhandi dan FKIP Universitas Peradaban) dan Pakar IT
11. Perwakilan Pendidik (Guru) Kabupaten Brebes
12. Kunjungan lapangan ke sekolah penerima bantuan TIK (SMK Mekatronik Jatibarang dan SMK Ma'arif NU 01 Jatibarang).

B. Susunan Keanggotaan Tim

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 dipimpin oleh Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M. Tim kunjungan kerja ini didampingi pula oleh Dr. Muhammad Hasbi sebagai Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek RI. Selain itu turut hadir juga Tim Sekretariat dan Tenaga Ahli dari Komisi X DPR RI.

C. Identifikasi Data dan Informasi

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes terkait kebijakan Bantuan Perangkat TIK ke satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan melakukan pendataan kebutuhan TIK di seluruh SD dan SMP melalui Desk Pendataan Kebutuhan TIK
 - b. Melakukan sosialisasi ANBK untuk SD dan SMP dan kebutuhan TIK untuk kegiatan tersebut.
 - c. Melalui pengajuan DAK Bidang Pendidikan tahun berjalan
 - d. Melalui DAU Bidang Pendidikan di APBD dan APBN
2. Dukungan dan fasilitas yang telah diterima oleh satuan Pendidikan di Kabupaten Brebes terkait bantuan perangkat TIK dan dampaknya terhadap proses pembelajaran di satuan Pendidikan yaitu:
 - a. Melalui DAK Bidang Pendidikan APBN.
 - b. Melalui DAU APBD I dan APBD II.
 - c. Guru lebih inovasi dalam proses pembelajaran dengan penerapan *High Order Thinking Skill* (HOTS) dan *Technological Pedagogical and Content Knowledge* (TPACK).
 - d. Pelaksanaan ANBK menjadi lebih lancar.
3. Kendala yang ditemui Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penggunaan bantuan TIK yaitu:
 - a. Jumlah SD 898 dan SMP 175 sedangkan bantuan TIK terbatas.
 - b. Jaringan listrik dan jaringan internet belum bisa mencakup semua sekolah di daerah perbukitan.

- c. Selalu berusaha mengajukan permohonan bantuan TIK kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Evaluasi kesiapan sarana dan infrastruktur perangkat dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar.
 - a. Pelaksanaan AKM, Survei Karakter dan Sulingjar sebagai rangkaian dari ANBK yang berbasis komputer membutuhkan kesiapan pada perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan internet.
 - b. Keluwesan jadwal yang terbagi pada 4 gelombang pelaksanaan dengan maksimal 3 sesi setiap harinya memudahkan Satuan Pendidikan yang masih minim perangkat kerasnya.
 - c. Jaringan internet yang cukup merata di Kabupaten Brebes membuat pelaksanaan ANBK berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
 - d. Adanya bantuan *Chromebook* sangat membantu pelaksanaan ANBK, karena pelaksanaan AKM menjadi lebih cepat (cukup 2 sesi), dan proses pengisian survei juga menjadi lebih mudah.
5. Pemerintah Kabupaten Brebes setuju dengan kebijakan bantuan perangkat TIK di satuan pendidikan dan berharap ada penambahan bantuan. Selama menerima bantuan tersebut, Pemkab Brebes tidak perlu mengalokasikan biaya lain.
6. Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik Pendidikan untuk bantuan perangkat TIK di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.
 - a. Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik untuk bantuan perangkat TIK dilaksanakan oleh penyedia dan dikirim langsung ke sekolah penerima.
 - b. Terdapat 265 sekolah yang sudah mendapatkan perangkat TIK.
 - c. Perangkat TIK yang telah didistribusikan kepada sekolah sangat bermanfaat untuk kegiatan ANBK dan kegiatan Belajar Mengajar di era digital.
7. Platform Merdeka Mengajar dapat diakses oleh semua elemen Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta, karena aplikasinya bersifat terbuka, dapat di semua perangkat baik PC maupun *mobile*, dengan basis sistem operasi Windows, IOS maupun Android. *Keyword* yang digunakan adalah akun *belajar.id*. Jadi selama insan Pendidikan (guru, murid, PTK, Dinas) memiliki akun *belajar.id*, maka yang bersangkutan dapat masuk, berselancar dan beraktivitas pada *platform* tersebut.
8. Mempertimbangkan era digital dan banyaknya sekolah yang terdapat di Kabupaten Brebes, Pemkab Brebes mengharap agar anggaran dan kuota sekolah penerima bantuan di Kabupaten Brebes dapat ditingkatkan sehingga semakin banyak sekolah yang memperoleh perangkat TIK.
9. SMK Mekatronik Jatibarang dengan jumlah siswa sekitar 60 yang dikunjungi tim kunjungan kerja memperoleh 15 *Chromebook* dan proyektor. Bantuan *Chromebook* tersebut mendorong sekolah untuk memasang wifi sehingga *Chromebook* dapat digunakan untuk belajar siswa. Sekolah tidak mempublikasikan fasilitas tersebut kepada khalayak (hanya getok tular

saja) karena khawatir memicu pencurian, karena keamanan yang masih kurang. Persoalan keamanan ini diatasi dengan jaga malam dan pemasangan CCTV.

10. SMK Ma'arif NU Jatibarang dengan jumlah siswa 54 dan 14 guru membuka dua jurusan, yakni teknologi jaringan dan jurusan sepeda motor. Sarana prasarana masih minim meski memiliki lahan 4500 meter persegi. SMK tersebut sudah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes dan telah tergabung di asosiasi BKK sehingga para lulusan dapat diserap perusahaan-perusahaan. Selain itu, sekolah juga mendapat dukungan dari Kemnaker dalam pembuatan kartu kuning. Mengenai bantuan TIK, sekolah ini mendapat 15 *Chromebook*, proyektor dan *router*. Dapat juga sewa *cloud* penyimpanan, tetapi belum dapat diakses.

D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan

1. Kepala SMK Mekatronik Jatibarang menyampaikan bahwa pihaknya berharap sekolah yang dipimpinnya dapat terus berkembang dengan peningkatan sumber daya dan dukungan sarana prasarana.
2. Kepala SMK Ma'arif NU Jatibarang mengeluhkan mengenai regulasi bantuan RKB dan RPS yang mengharuskan jumlah minimal siswa. Menurutnya, semakin banyak jumlah siswa, maka semakin banyak bantuan yang diperoleh sekolah tersebut dan justru membuat kesenjangan. Sekolahnya yang minim jumlah siswa hanya boleh mendapatkan bantuan rehab.
3. Perwakilan Guru di SMK Ma'arif NU Jatibarang menyampaikan beberapa hal di antaranya: honor guru swasta yang kecil dan pembiayaan yayasan, juga soal kesetaraan guru swasta dan negeri. Selain itu juga disampaikan bahwa kurikulum kerap berubah, padahal butuh waktu bagi guru untuk memahami dan kemudian mengimplementasikan di kelas. Persoalan perlindungan guru juga menjadi hal yang sorotan. Undang-undang juga harus berpihak pada guru.
4. Perwakilan MKKS menyampaikan mengenai seleksi PPPK di sekolah swasta. Guru yang sudah meniti karir di sekolah swasta, dibina dan bagus kinerjanya ditarik ke negeri. Ibarat swasta yang menanam, negeri yang memanen.
5. Caridah, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes mengatakan selain bantuan TIK, mungkin perlu bantuan laboratorium juga karena hampir 99% penerima tidak memiliki laboratorium. Bantuan fisik masih dibutuhkan. Untuk tahun 2024, terdapat 420 sekolah rusak dan pada tahun 2023 hanya dapat 43 lokus (10%), padahal direncanakan 2027 selesai. Kalau hanya 10% maka butuh 10 tahun, dan bisa jadi 10 tahun kemudian sekolah-sekolah yang saat ini sudah bagus akan rusak juga. Berharap persoalan ini bisa segera selesai agar dapat meningkatkan Rapor Mutu Pendidikan Kabupaten Brebes.

6. Kepala SDN 02 Brebes, Yusti Puspitawati, berharap bantuan TIK bisa diperoleh seluruh sekolah. Terdapat keterbatasan *Chromebook* yaitu keterbatasan fungsi, tidak bisa menyimpan banyak file, memorinya terbatas, lebih baik menggunakan laptop biasa. Selain itu, di lapangan, guru takut membawa pulang *Chromebook* karena takut hilang atau pun kena banjir karena sejumlah titik di Brebes rawan banjir.
7. Juvita, Dinas Pendidikan Kab. Brebes menyampaikan selama ini penggunaan *Chromebook* untuk ANBK cukup sukses. Tetapi, untuk pembelajaran, guru harus melakukan akselerasi agar dapat maksimal dalam memanfaatkannya. Pada pelaksanaan ANBK, Kepsek dan guru melakukan inovasi, meminjamkan laptop milik orang tua atau meminjam ke jenjang di atasnya karena jumlah *Chromebook* terbatas. Keterbatasan jumlah ANBK dan kondisi sekolah-sekolah yang belum bisa mandiri dalam pelaksanaan ANBK menyebabkan ANBK dilakukan secara bergelombang. Sekolah perlu menyiapkan ruangan, internet, listrik, dst untuk pelaksanaan ANBK. Dinas tidak berhenti mendorong sekolah untuk memasang internet. Tidak dapat dipungkiri kendala-kendala tersebut masih terdapat di wilayah yang berada di Pantura. Kondisi di daerah pelosok tentu lebih menantang lagi.
8. Komisi X DPR RI melalui Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., Rano Karno, S.I.P, Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T., Dr. Fahmy Alaydroes, M.M., M.Ed., Drs. H. Andy Muawiyah Ramli, M.Si., Desy Ratnasari, S.Psi., M.Si., M.Psi., Dra. Adriana Dondokambey, M.Si., Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M., Ir. Nuroji, M.Si., memberikan respon pada kegiatan diskusi dengan poin-poin sebagai berikut.
 - a. Mengapresiasi dengan upaya yang dilakukan pelaku pendidikan di daerah, meskipun memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.
 - b. Kepsek dan guru perlu jeli menangkap peluang untuk mengembangkan pendidikan di sekolahnya masing-masing, menjalin kerja sama dengan dunia industri sehingga penyelenggaraan pendidikan (khususnya di SMK) dapat lebih optimal.
 - c. Komisi X DPR RI tidak memiliki kewenangan terkait sarana prasarana, tetapi sepakat bahwa aturan mengenai jumlah minimum siswa untuk bantuan RKB tidak berkeadilan.
 - d. Perlindungan guru tidak cukup hanya dengan Permen, dan akan terus disuarakan oleh Komisi X.
 - e. Persoalan *blankspot* internet perlu disampaikan kepada pemilik domain, yakni Kominfo RI.
9. Dr. Muhammad Hasbi, Direktur SD Kemendikbudristek RI menyampaikan sejumlah hal untuk merespon, yakni sebagai berikut :
 - a. *Chromebook* dipilih setelah melakukan riset mengenai sistem yang dapat digunakan. Selain itu, *Chromebook* juga digunakan di beberapa negara lain untuk program serupa.

- b. Penentuan sekolah penerima bantuan ini didasarkan pada data pokok pendidikan. Misalnya data internet dan listrik yang menjadi basis penetapan bantuan TIK. Persoalan yang terjadi di lapangan menjadi pelajaran dan bisa menjadi masukan agar data pokok pendidikan perlu lebih spesifik, serta verifikasi apakah sekolah memiliki listrik dan internet yang stabil baru dikirim bantuan.
- c. Relasi *Chromebook* dan ANBK terdapat beberapa moda yang bisa menjadi pilihan dalam pelaksanaan ANBK. Pada pelaksanaan ANBK tidak ada persyaratan harus menggunakan *Chromebook*.
- d. Terdapat 12 komponen DAK non-fisik, salah satunya adalah pembiayaan asesmen, yang di antaranya asesmen berbasis komputer.
- e. Mengenai jumlah penerima bantuan, masih sangat terbatas. Sampai dengan 2022 hanya 35% dan apabila tidak ditingkatkan, maka perlu 15 tahun agar bisa mencapai seluruh SD di Indonesia.
- f. Rapor pendidikan dikonstruksi dari AN dan berbagai data lain yang dihimpun. *Chromebook* diperlukan untuk mengakses informasi pada rapor yang ada pada data pendidikan. Akses tersebut bisa juga dengan perangkat lain. Upaya untuk memperbaiki kualitas perencanaan di daerah tidak tergantung perangkat yang digunakan.
- g. Mengenai *Chromebook* yang hilang, perlu kerjasama karena nantinya keberadaan *Chromebook* yang hilang bisa dilacak posisinya ketika terhubung dengan internet.
- h. *Chromebook* memang tidak dirancang untuk menyimpan banyak file, karena sudah terdapat akun belajar.id yang memfasilitasi hingga 100 gigabit.

E. Kunjungan Lapangan

Tim kunker melakukan kunjungan lapangan ke sekolah penerima Bantuan TIK di Kabupaten Brebes, di antaranya SMK Mekatronik Jatibarang dan SMK Ma'arif NU 01 Jatibarang. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat penggunaan bantuan TIK di satuan pendidikan. Kedua sekolah tersebut memanfaatkan bantuan TIK berupa *Chromebook*, proyektor, dan *router* dengan baik meski masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Bantuan sarana prasarana berupa ruang kelas masih mereka butuhkan, tetapi terkendala minimal jumlah siswa untuk dapat mengakses bantuan tersebut.

III. KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Secara umum satuan pendidikan penerima bantuan perangkat TIK (*chromebook*) di Kabupaten Brebes memanfaatkan perangkat tersebut untuk melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), meskipun pihak satuan pendidikan memerlukan dukungan sarana prasarana lainnya seperti ketersediaan listrik, sambungan internet yang stabil, dan ruang laboratorium TIK.

2. Kepala Sekolah dan Guru di Satuan Pendidikan belum memanfaatkan akun belajar.id dan fasilitas penyimpanan sebesar 100GB di *google drive* yang telah disediakan, karena kurangnya informasi dari pihak Kemendikbudristek. Kondisi ini mengakibatkan *chromebook* tidak digunakan untuk mengakses aplikasi *platform* merdeka belajar karena keterbatasan ruang simpan bawaan *chromebook*.
3. Kabupaten Brebes memerlukan bantuan pembangunan fisik sekolah. Data sekolah rusak pada tahun 2024 sejumlah 420 sekolah dan hanya 43 lokus sekolah (10%) yang dibangun/direhabilitasi. Perbandingan tersebut akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk dapat menyelesaikan perbaikan bagi 420 sekolah rusak.

B. Rekomendasi

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI mengevaluasi kembali skema sosialisasi kepada Pemda dan satuan pendidikan penerima bantuan perangkat TIK dan membuat pola pendampingan yang efektif agar Kepala Sekolah dan Guru dapat memanfaatkan perangkat TIK secara optimal semua *platform* merdeka belajar, tidak hanya untuk Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan KemenPUPR RI dalam hal memberikan data akurat peta kondisi fisik satuan pendidikan dan usulan skema percepatan perbaikannya sehingga mengurangi kesenjangan jumlah antara sekolah yang memiliki bangunan rusak dan kondisi sekolah yang baik.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Brebes pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 20 November 2023
Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Ttd.

Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A-444